

## **ANALISIS VIDIO**

MATA KULIAH : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
PROGRAM STUDI : PGSD  
KELAS : 2F  
PENGAMPU : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.  
2. Drs, Rapani, M.Pd.

Oleh : Putri Azzahra Aisa  
NPM : 2413053182  
Semester/Kelas : 2/F  
Mahasiswa PGSD, Universitas Lampung

### **ANALISIS VIDIO YANG BERJUDUL “SUPREMASI HUKUM BAGIAN 2”**

Video ini melanjutkan percakapan tentang supremasi hukum dengan menyoroti pentingnya undang-undang kontemporer dalam mengatur kehidupan masyarakat yang semakin rumit. Dalam hal ini, hukum tidak dapat hanya bergantung pada undang-undang adat atau internasional, yang mungkin tidak cukup mencerminkan lanskap masyarakat saat ini. Hukum modern yang dibuat dengan sengaja telah menjadi penting untuk membangun kerangka sosial yang beroperasi secara adil dan efektif. Intinya, hukum harus mengatasi tantangan zaman kontemporer dan menawarkan jaminan bagi individu yang menavigasi kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, video ini menekankan bahwa Indonesia, sebagai bangsa yang diatur oleh hukum menurut UUD 1945, harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang berlaku mendorong lingkungan yang aman dan nyaman bagi warganya. Jika tidak, ada bahaya bahwa hukum dapat disalahgunakan oleh individu-individu tertentu, seperti individu korup yang memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan pribadi mereka. Oleh karena itu, sangat

penting untuk menyadari bahwa praktik hukum yang cacat dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi masyarakat dan bangsa.

Terakhir, video ini juga menarik perhatian pada dampak reformasi 1998 yang menetapkan panggung untuk demokratisasi dan desentralisasi dalam kerangka hukum Indonesia. Dengan munculnya masyarakat sipil dan organisasi swadaya masyarakat seperti ICW dan POLICE WATCH, pengaruh publik terhadap hukum menjadi semakin kuat. Ini merupakan kemajuan positif untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya melayani beberapa orang terpilih, tetapi bermanfaat bagi semua segmen masyarakat. Dengan pengawasan publik dan keterlibatan aktif, diharapkan hukum dapat dilaksanakan secara lebih adil dan transparan, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.